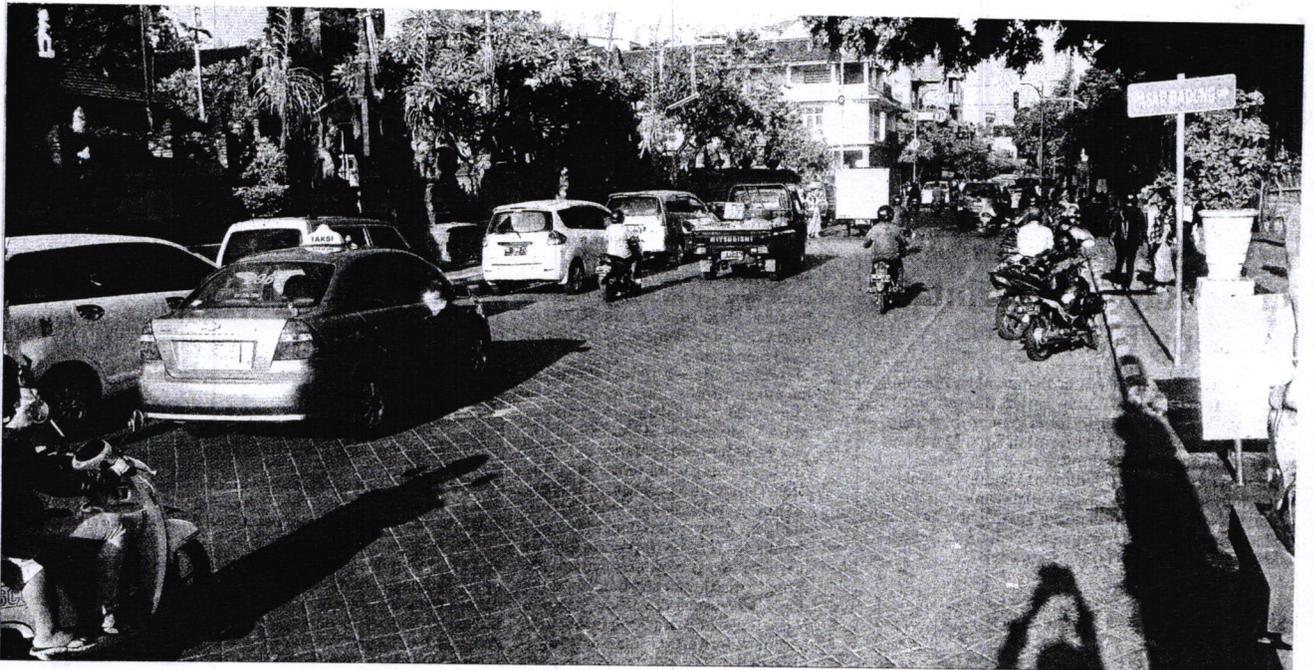




# Radar Bali

## Dua Direktur Jadi Tersangka



BERMASALAH: Proyek paving Jalan Gajah Mada Denpasar yang digarap 2012 silam menyeret dua orang tersangka korupsi.

MIFTAHUDIN/RADAR BA

### Dua Tersangka kasus Paving

	<p><b>Tersangka I</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alii Wihladyana umur 32</li> <li>• Kelahiran, Tabanan, 11 September 1982</li> <li>• Jabatan Direktur PT Alii Wirajaya</li> <li>• Alamat Jalan Cokorarinoto Gang Angsa Nomor 8 Denpasar</li> </ul>		<p><b>Tersangka II</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nguran Kusala Oakrawetri, 32</li> <li>• Kelahiran, Jembrana, 17 November 1981</li> <li>• Jabatan Direktur CV Unika Desalin</li> <li>• Alamat Jalan Nangka Gang Kakak Tula 1 Nomor 8 Denpasar</li> </ul>
--	--	--	---

### Dalam Kasus Paving Jalan Gajah Mada

DENPASAR - Kasus dugaan korupsi pedisterian atau pavingisasi Jalan Gajah Mada Denpasar, ternyata sudah menetapkan dua tersangka. Bahkan, penyerahan berkas tahap satu dari Polresta ke Kejari Denpasar pun sudah dilakukan.

"Berkas perkaranya sudah diserahkan, masuk tahap ke satu. Nanti jaksa peneliti melakukan penelitian atas berkas tersebut," ungkap sumber koran ini di Kejari Denpasar. "Kalau tidak salah ada dua atau tiga tersangka ■

► Baca Dua... Hal 31

Edisi : Kamis, 2 April 2015

Hal : 21 dan 31



Sambungan -

# Kerugian Rp 210 Juta Lebih

## ■ DUA

Sambungan dari hal 21

Dua dari rekanan dan ada satu dari unsur Pemkot Denpasar," sambung sumber tadi.

Kasi Pidsus Kejari Denpasar Wayan Sutarjana ketika dikonfirmasi membenarkan memang sudah ada penyerahan berkas perkara atas dugaan kasus korupsi pavingisasi di Jalan Gajah Mada. "Sudah ada. Memang pihak penyidik di Polresta sudah menyerahkan berkas. Ini namanya tahap kesatu, tugas kami melakukan penelitian atas berkas itu. Dan, jaksa peneliti sudah ditunjuk," ungkap Sutarjana. "Salah satu jaksa Ibu Yusmawati selaku jaksa peneliti," imbuhnya.

Namun, jaksa asal Susut, Bangli, ini mengatakan baru dua berkas yang masuk ke kejari. Artinya, dua berkas tersangka

sudah mulai diteliti oleh pihak kejari. "Yang masuk baru dua. Masak infonya ada tiga tersangka? Yang masuk ke kami baru dua," imbuhnya.

Infonya selain dari rekanan ada dari unsur DTRP (Dinas Tata Ruang dan Perumahan)? "Belum ada. Baru dua masuk dari Polresta," ungkapnya. Dua nama itu adalah Alit Widhiadnyana, 32, yang adalah putra kelahiran Tabanan 11 September 1982. Dia adalah Direktur PT Alit Wirajaya yang menggarap proyek pedisterian Jalan Gajah Mada. Dengan alamat Jalan Cokroaminoto Gang Angsa Nomor 8 Denpasar.

Sedangkan tersangka kedua adalah Ngurah Kosala Cakrawethi, 32, kelahiran Jembrana 17 November 1981. Dia adalah Direktur CV Unika Desain, sebagai konsultan pengawas proyek pedisterian Jalan

Gajah Mada. Dengan alamat Jalan Nangka Gang Kakak Tua I Nomor 8 Denpasar.

Atas informasi ini, koran ini berusaha mencari sampul berkas perkara di Polsresta Denpasar. Akhirnya didapatkan, proses singkat terjadinya kasus ini. Dengan nomor berkas BP/39/III/2015/Reskrimsus Polresta Denpasar. Berdasarkan sampul berkas perkara, disebutkan terjadi perkara tindak pidana korupsi pada pekerjaan kegiatan pedisterian di Jalan Gajah Mada. Pekerjaan itu dilaksanakan oleh PT Alit Wirajaya dengan nomor kontrak 650/612/DTRP/2012. Dengan tanggal kontrak 21 Mei 2012. Kontrak ini dilakukan antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Tata Ruang dan Perumahan Denpasar (DTRP) I Dewa Cipta Sudewa Atmaja dengan PT Alit Wirajaya atas nama

hal. 2

Edisi : Kamis, 2 April 2015

Hal : 21 dan 31



# Radar Bali

Sambungan .

Alit Widhiadnyana. Dengan nilai kontrak Rp 2,5 miliar lebih atau Rp 2.520.000.000.

Proyek ini sudah ada adendum (perubahan kontrak), namun dalam pengerjaannya tidak dikerjakan sesuai adendum. Sedangkan peran singkat dari tersangka II, Ngurah Kosala Cakra Werti selaku Direktur CV Unika Desain, sebagai konsultan pengawas yang bekerja sebagai konsultan berdasarkan kontrak kerja berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 650/615/DTRP/2012 tanggal 21 Mei 2012. Konsultan ini dinyatakan tidak melakukan pekerjaan pengawasan sesuai dengan kontrak.

Dengan kondisi ini, baik PT Alit Wirajaya tidak melakukan pekerjaan sesuai kontrak dan PT Unika Desain tidak melakukan pengawasan. Bahkan, pihak pengawas juga menandatangani laporan

kemajuan fisik pekerjaan minggu ke-30 yang menyatakan pekerjaan telah mencapai 100 persen. Surat tersebut digunakan mengajukan termin pembayaran. Sehingga pembayaran diterima sampai 100 persen.

Berdasarkan surat ketua Jurusan Teknik Sipil Unud Nomor 639/UN.14.1.31.1.2/PM.03/2013 yang melakukan kajian pembuatan pedisterian Gajah Mada, tertanggal 5 Desember 2013, dari hasil kajian tersebut, ditemukan kekurangan volume yang tidak sesuai dengan RAB kontrak adendum. Total biaya yang kurang, *real cost* Rp 279,2 juta lebih, PPN 10 persen Rp 27,9 juta lebih dengan jumlah Rp 307,2 juta lebih. Setelah

dilakukan penghitungan kerugian negara berdasarkan hasil audit BPKP perwakilan Bali Nomor SR-573/PW22/5/2014 tanggal 29 September 2014 atas dugaan tipikor dalam pavingisasi di Jalan Gajah Mada ditemukan kerugian negara Rp 210.541.795 atau Rp 210 juta lebih.

Dua tersangka ini melanggar Pasal 2 jo Pasal 18 subsider Pasal 3 jo Pasal 18 Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang undang - undang yang sama. Dalam berkas itu terdapat tanda tangan dari penyidik Nengah Sudiarta dan I Putu Carlos Doles-

git. Dua orang ini adalah penyidik Reskrimsus Polresta Denpasar.

Kepala Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar Made Kusuma Diputra ketika dikonfirmasi membenarkan nilai proyek dengan nilai kontrak Rp 2,5 miliar tersebut. "Ya, Pak, nilainya memang sejumlah dua miliar lebih dan kontraknya sudah tahun 2012 lalu," ujarnya.

Disinggung mengenai dua tersangka yang telah ditetapkan Polresta Denpasar, Made Kusuma Diputra mengaku tidak tahu. "Saya belum dengar masalah ditetapkan dua tersangka tersebut. Saya juga baru dengar ini. Maaf ya saya tidak tahu," ujarnya. (art/hen/yes)

Edisi : Kamis, 2 April 2015

Hal : 21 dan 31



# Radar Bali

**KASUS CANDRA**



MIFTAHUDDIN/RADAR BALI

**BERSAKSI:** Made Senaya (kiri) saat bersaksi untuk terdakwa Wayan Candra di Pengadilan Tipikor Denpasar, kemarin.

## Saksi Dikejar Soal Kapal Cepat Rocky

**DENPASAR** - Rumor tentang kepemilikan kapal cepat Rocky dengan rute Sanur-Nusa Lembongan muncul dalam sidang kasus korupsi dengan terdakwa mantan bupati Klungkung Wayan Candra, kemarin (1/4). Namun, hal itu langsung dibantah oleh saksi I Made Senaya saat dikejar oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Tipikor Denpasar. Senaya dengan tegas mengatakan itu miliknya sendiri. Dia mengaku dengan dana pribadi, dan saat ini bernaung di bawah PT Tirta Segara. "Saya punya sendiri, ■

► Baca **Saksi...** Hal 31

hal. 1

Edisi : Kamis, 2 April 2015

Hal : 21 dan 31



Sambungan

## Berkas Tim 9 Segera Disidang

■ SAKSI

Sambungan dari hal 21

sahamnya juga saya punya sendiri. Saya yang membeli dengan dana pribadi di bawah PT Tirta Segara," ungkapnya membantah rumor tersebut.

Senaya juga menjelaskan, memang antara posisi dirinya dengan Candra ada kedekatan hubungan satu *merajan* (pura) leluhur. "Saya dengan Pak Candra satu *kawitan* (leluhur)," ungkap Senaya, dengan gaya rambut nyentrik.

Dia juga menjelaskan bahwa tahun 2010 dan tahun 2011, terkait dengan catatan rekening ada aliran dana saksi ke rekening Candra dengan nilai Rp 25 juta dan Rp 11 juta. Selain itu, saksi juga pernah meminjam uang ke Candra dengan nilai Rp 100 juta dan Rp 150 juta. Namun, fungsi dana ini tidak dijelaskan secara detail. "Uang itu sudah saya kembalikan, tidak jelas waktu itu untuk apa. Karena sudah lama," lanjutnya di hadapan Ketua Majelis Hakim Hasoloan Sianturi dan anggotanya, Sumali serta Hartono.

Saksi lain juga diperiksa adalah I Gede Suadiarta terkait dengan kredit di Bank Parta Kencana. Soal tanah, Kadus di Gunaksa Pasek Ariawan juga diminta kesaksiaannya. Hanya saja saksi ini tidak tahu kalau ayahnya Ketut Rugeg seperti penjelasan jaksa memiliki tanah di Gunaksa.

Sementara itu, terkait berkas Tim 9 yang juga terkait dengan kasus pengadaan lahan Dermaga Gunaksa, dikatakan sudah dilimpahkan. Hal itu

diungkapkan Kasi Intel Kejari Klungkung Suhadi, yang juga menjadi JPU dalam kasus Candra. "Sudah kami limpahkan berkas Tim 9, nantinya tidak dijadwalkan sidangnya dan penunjukan majelis hakim. Nantinya akan disidangkan di Pengadilan Tipikor," ungkap Suhadi kemarin.

Dia mengatakan, bahwa untuk Tim 9 dibagi menjadi tiga berkas. Data yang didapatkan koran ini, malah sudah ada penunjukan majelis hakim. Berkas pertama berisikan tiga terdakwa, yakni terdakwa Ketut Janapria selaku mantan Sekda Klungkung, I Made Ngurah dan AA Sagung Mastini yang mantan kepala BPN Kabupaten Klungkung. Majelis hakimnya adalah ketua majelis Beslin Sihombing serta anggota, Sumadi dan Hartono.

Sementara pada berkas perkara kedua, dengan empat terdakwa yakni, Anak Agung Ngurah Agung, I Nyoman Rahayu, Made Sugiarta, dan I Nyoman Sukantra. Untuk berkas perkara kedua ini, dengan majelis hakim Putu Gde Haryadi sebagai ketua dan anggota Guntur serta Miftahul Cholis.

Untuk berkas perkara ketiga, berisikan dua terdakwa, yakni terdakwa I Gusti Ngurah Gede dan I Gusti Gde Wiratmadja. Terhadap perkara ini, akan disidangkan oleh majelis hakim yang dipimpin oleh Cening Budiana dan anggota Miftahul dan Nurbaya. Seperti halnya berita sebelumnya, nilai total dugaan korupsi dan gratifikasi atas terdakwa Candra adalah Rp 60 miliar lebih atau Rp 60.026.654.218. (art/yes)



## Radar Bali

Ketika Nyoman Parta dan Para Bidan Mempertanyakan Masa Depan

# Mengadu ke BKD Bali, Minta Pemerintah Peduli

Puluhan petugas bidan PTT (perawai tidak tetap) yang sebelumnya diangkat melalui Surat Keputusan (SK) pemerintah pusat dan ditempatkan di seluruh kabupaten/kota di Bali, kemarin (1/4) kembali mendatangi kantor Badan Kepegawaian daerah (BKD) Provinsi Bali. Mereka ingin mendapat kejelasan statusnya.



DOK. RADAR BALI

**BERMUATAN POLITIS? : Nyoman Parta mengaku berusaha mencari solusi ke pusat terkait kejelasan nasib petugas bidan PTT.**

**PULUHAN** petugas bidan PTT dari perwakilan 430 bidan PTT se-Bali itu untuk kembali mendapat nasib mereka. Didampingi Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali, Nyoman Parta, para perwakilan bidan PTT itu *mesadu* soal ketidakpastian nasib mereka.

Ini seperti yang disampaikan koordinator perwakilan Bidan PTT Ni Wayan Nurlalu. Dalam kesempatan itu, dia menyatakan bahwa kedatangannya ke kantor BKD Bali itu yakni untuk meminta kepada pemerintah agar bisa memperjuangkan nasib mereka. Dikatakan, meski segala upaya pernah dilakukan mulai dari upaya mendatangi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MempPAN-RB), Menteri Kesehatan dan mendatangi staf kepresidenan RI di Jakarta, namun upaya-upaya itu diakui tak membuahkan hasil.

Terlebih kata Nurlalu, kondisi ini diakui paling parah dialami rekan-rekan bidan PTT di Bandung. Sejumlah bidan PTT di Bandung diakui bahwa hingga April 2015 ini juga tak kunjung mendapat SK kontrak. "Padahal kami sudah berupaya untuk menghadap wakil bupati

Badung, namun sampai sekarang juga teman-teman belum mendapat jawaban," akunya.

Bahkan lebih miris lagi, dengan usia mereka yang sudah tua, dengan pengabdian selama sembilan tahun, hal itu juga menjadi kendala bagi para bidan PTT untuk mengikuti formasi tes CPNS. "Mereka tidak mungkin lagi bisa ikut (formasi tes CPNS) karena sudah terbentur usia. Kalau mereka tetap bertahan masa kerja yang dimiliki kembali ke nol. Selain itu, tunjangan lain di luar gaji pokok yang diperoleh sekarang juga dipangkas sehingga teman-teman mereka hanya menerima gaji sekitar Rp 1,7 belum termasuk dipotong pajak," terangnya.

Menanggapi aduan perwakilan bidan PTT, Kepala BKD Provinsi Bali Ketut Rochineng menyatakan bahwa, semestinya pemerintah kabupaten tempat bidan PTT ditempatkan, seharusnya bisa mengusulkan melalui formasi khusus. "Kalau kembali ke nol, maka pengabdian mereka akan sia-sia. Apalagi mereka sudah memiliki pengaman dan bisa dikatakan sebagai tenaga handal, harusnya bisa dimanfaatkan dan diusulkan untuk bisa di-

angkat jadi PNS," tandasnya.

Untuk itu, Rochineng meminta kepada Bidan PTT ini untuk melengkapi administrasi semua datanya untuk disampaikan kepada gubernur Bali. Sehingga, nanti gubernur dapat mengeluarkan rekomendasi. "Rekomendasi inilah yang nantinya akan dibawa ke pusat agar semua Bidan PTT langsung bisa diangkat oleh pusat dan kami akan perjuangkan," terangnya.

Sementara itu Ketua Fraksi PDI Perjuangan Nyoman Parta menyampaikan, saat kunjungan DPR-RI ke gedung Wiswa Sabha beberapa waktu lalu, sudah pernah memerintahkan pada pemerintah agar segera mengangkat semua Bidan PTT baik yang mengantongi SK Pusat maupun SK di daerah masing-masing. Namun sampai saat ini belum ada kejelasannya dan terbukti sampai saat ini nasibnya para bidan PTT tak jelas. Setelah rekomendasi gubernur keluar, DPRD Bali juga akan ikut melampiri rekomendasinya. "Kasihan mereka. Kami siap memperjuangkan dan kami akan usulkan untuk dibahas di Kongres PDIP bersama wakil-wakil rakyat di pusat," pungkasnya. (didik dwi praptono/pit)

Edisi : Kamis, 2 April 2015

Hal : 23



## Penataan Aset di Klungkung Belum Maksimal

### Pansus Temukan SIM Penggarap Berpindah Tangan

**DENPASAR** - Panitia Khusus (Pansus) Aset DPRD Bali terus menelusuri pengelolaan aset-aset milik Pemerintah provinsi (Pemprov) Bali. Setelah sebelumnya tim pansus DPRD Bali melakukan penelusuran aset-aset Pemprov Bali di Badung, kemarin (1/4) Pansus Aset di bawah pimpinan Ketua Pansus Aset DPRD Bali Wayan Gunawan melakukan penelusuran aset di Klungkung. Dalam kunjungannya ke Klungkung, rombongan Pansus Aset DPRD Bali yang berjumlah sekitar 14 orang tersebut diterima langsung oleh Pelaksana tugas (Plt) Sekda Klungkung IB Sudarsana, kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Pemkab Klungkung, kepala Dinas Kesehatan, kepala Dinas Pertanian, kepala Dinas Perhubungan, kepala Dinas Pendidikan, kepala Bidang Aset



Wayan Gunawan

Pemkab Klungkung serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Klungkung.

Dari kunjungan Pansus Aset ke Klungkung, dinilai banyak aset-aset Pemprov Bali yang ada di kabupaten kota belum tertata dengan baik. Bahkan di kabupaten Klungkung khususnya aset-aset berupa tanah sawah surat izin menggarap (SIM) banyak yang sudah berpindah tangan tanpa sepengetahuan pemerintah provinsi.

Seperti ditegaskan Ketua Pansus Aset DPRD Bali Wayan Gunawan usai melakukan kunjungan dan pendataan aset dari

Pemkab Klungkung kemarin, selama ini dalam pengelolaan aset-aset Pemprov banyak yang belum jelas apakah dikerjasamakan atau dipinjam pakai. "Kami turun ke kabupaten, kami ingin mendapatkan data faktual mengenai keberadaan aset Pemprov di semua kabupaten dan ini menjadi pekerjaan besar Pansus Aset," ujar Wayan Gunawan.

Politisi Golkar asal Kabupaten Bangli ini menjelaskan, total aset Pemprov Bali yang ada di Kabupaten Klungkung mencapai 974 bidang tanah. Dari jumlah itu sama dengan 23 hektare berupa tanah sawah dan tanah tegalan. Aset-aset tersebut ada dimanfaatkan untuk pembenihan ikan, peternakan, pendidikan pengkajian pertanian. Tanah-tanah sawah di Klungkung cukup banyak digarap oleh masyarakat. Namun demikian, terkait kontribusi kepada Provinsi untuk ikut mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) sangat kecil. "Kontribusinya sangat kecil dan selama ini pembagian hasilnya 60 untuk provinsi dan 40 peng-

garap," bebernya.

Semua aset yang ada, Pansus Aset berkeinginan untuk mengetahui mengenai kepastian hukum dalam konteks kerjasama pengelolaan aset, sehingga menjadi jelas dalam pertanggungjawaban aset Pemprov Bali. Hal ini sering menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lantaran tidak adanya kepastian hukum dalam konteks kerjasamanya lebih-lebih masih terhadap aset Pemprov yang belum tercatat.

Wayan Gunawan menambahkan, banyak aset Pemprov yang digarap oleh masyarakat sudah berpindah tangan tanpa ada pemberitahuan. Di sinilah perlunya adanya surat izin menggarap yang diberikan pada masyarakat penggarap. Setiap ada perpindahan tangan menggarap harus ada pemberitahuan baik pada pemerintah kabupaten maupun provinsi. "Kita berharap ini tidak terjadi, harus ada pola kerjasama yang jelas sehingga ada kepastian hukum dan ada tertib administrasi dalam pengelolaan aset," pungkasnya. (adv)